

Perubahan Renja
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bantul
Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan

daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 18 01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai AKIP	Angka	85	6.255.908.539	0	1.319.432.948	0,00	21,09	
2 18 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Persen	100	16.100.000		4.450.000	0,00	27,64	
2 18 01 2.01 01	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	9.000.000	2	3.187.500	33,33	35,42	
2 18 01 2.01 06	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	4.500.000	3	1.062.500	25,00	23,61	
2 18 01 2.01 07	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	2.600.000	1	200.000	25,00	7,69	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
2 18 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Persen	100	4.980.070.730		1.140.316.749	0,00	22,90	
2 18 01 2.02 01	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	32	4.911.310.730	26	1.123.276.749	81,25	22,87	
2 18 01 2.02 02	Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	68.760.000	1	17.040.000	25,00	24,78	
2 18 01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100	67.600.100	-	-		0,00	
2 18 01 2.05 11	Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60	67.600.100	-	-		0,00	
2 18 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Persen	100	377.652.602		78.260.782	0,00	20,72	
2 18 01 2.06 01	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	14.008.710	1	5.232.677	50,00	37,35	
2 18 01 2.06 02	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	87.112.600	1	30.172.600	20,00	34,64	
2 18 01 2.06 03	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	39.054.292	1	15.655.005	50,00	40,09	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
2 18 01 2.06 05	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	42.514.000	1	8.849.000	20,00	20,81	
2 18 01 2.06 06	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	6.600.000	6	1.524.000	100,00	23,09	
2 18 01 2.06 08	Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	18.245.000	3	3.480.000	25,00	19,07	
2 18 01 2.06 09	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	156.598.000	3	12.375.000	25,00	7,90	
2 18 01 2.06 10	Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	5	6.220.000	2	660.000	40,00	10,61	
2 18 01 2.06 11	Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	7	7.300.000	1	312.500	14,29	4,28	
2 18 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	280.447.257		66.075.133	0,00	23,56	
2 18 01 2.08 01	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.190.000	3	1.000.000	25,00	45,66	
2 18 01 2.08 02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	19.200.000	3	2.815.150	25,00	14,66	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
2 18 01 2.08 03	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	41.536.205	3	9.517.050	25,00	22,91	
2 18 01 2.08 04	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	217.521.052	3	52.742.933	25,00	24,25	
2 18 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen		415.402.850		30.330.284		7,30	
2 18 01 2.09 02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	151.249.850	14	23.432.000	100,00	15,49	
2 18 01 2.09 06	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	122	38.060.000	122	6.898.284	100,00	18,12	
2 18 01 2.09 09	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	226.093.000	0	-	0,00	0,00	
2 18 01 2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan	Persen		118.635.000		-		0,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
		Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul								
2 18 01 2.13 04	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	12	118.635.000	0	-	0,00	0,00	
2 18 02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	Persen	100	40.831.750	-	2.562.500	0,00	6,28	
2 18 02 2.01	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	Dokumen		30.631.750	-	0	0,00	0,00	
2 18 02 2.01 01	Subkegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	17.091.750	0	-	0,00	0,00	
2 18 02 2.01 03	Subkegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	1	13.540.000	0	-	0,00	0,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
2 18 02 2.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta potensi yang memuat data dan informasi investasi	Peta Potensi		10.200.000		2.562.500		25,12	
2 18 02 2.02 01	Subkegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	5.100.000	-	1.062.500		20,83	
2 18 02 2.02 04	Subkegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	5.100.000	-	1.500.000		29,41	
2 18 03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	Persen	100	210.417.236	-	8.253.109		3,92	
2 18 03 2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah	Persen		210.417.236	-	8.253.109		3,92	
2 18 03 2.01 02	Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	6.000.000	-	850.000		14,17	
2 18 03 2.01 03	Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen	1	204.417.236	0	7.403.109		3,62	
2 18 04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Persen	100	425.888.634		109.239.551	-	25,65	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
2 18 04 2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	legalitas		425.888.634		109.239.551	-	25,65	
2 18 04 2.01 05	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	6.000.000	0	-	0,00	0,00	
2 18 04 2.01 06	Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	1800	296.600.016	606	83.846.756	33,67	28,27	
2 18 04 2.01 07	Subkegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan	Orang	850	24.275.000	0	1.950.000	0,00	8,03	
2 18 04 2.01 08	Subkegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	2100	99.013.618	606	23.442.795	28,86	23,68	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
2 18 05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen	100	82.012.436	-	7.869.843	-	9,60	
2 18 05 2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan	Perusahaan	10	82.012.436	-	7.869.843	-	9,60	
2 18 05 2.01 04	Subkegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	122	10.625.000	0	-	0,00	0,00	
2 18 05 2.01 05	Subkegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	120	24.225.000	0	-	0,00	0,00	
2 18 05 2.01 06	Subkegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	14	47.162.436	2	7.869.843	14,29	16,69	
2 18 06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan aplikasi SIM dalam layanan perizinan dan non perizinan	Persen	100	146.382.436	-	10.744.843	-	7,34	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
2 18 06 2.01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/kota	Database	2	146.382.436	2	10.744.843	-	7,34	
2 18 06 2.01 01	Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah,Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	2	146.382.436	2	10.744.843	100,00	7,34	
	JUMLAH				7.155.441.031		1.458.102.794		20,38	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, bahwa efisiensi anggaran menjadi kendala yang signifikan, sehingga diperlukan strategi pengelolaan anggaran yang lebih baik untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan diharapkan dapat mencapai hasil yang optimal.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target t Akhir Perio de Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							7.083.714.293,00	7.352.341.031,00	7.209.770.231,00						14.441.117.256,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.883.714.293,00	7.152.341.031,00	7.047.546.531,00						14.241.117.256,00		
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							6.883.714.293,00	7.152.341.031,00	7.047.546.531,00						14.241.117.256,00		
1	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				85 angka	85 angka	6.088.167.527,00	6.246.808.539,00	6.217.014.039,00							12.569.604.256,00	
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	-			100 persen	100 persen	16.100.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Publik Berkas Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul		152.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capaia n RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantap an Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a			118.000.000,0 0	DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2.0 1	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantap an Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a			17.000.000,00	DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2.0 1	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantap an Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a			17.000.000,00	DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capaia n RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
																			Nasional		Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	1 8	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah \$AKIP	-			100 persen 85 Nilai	100 persen 85 Nilai	4.920.815.85 8,00	4.970.970.73 0,00	4.970.970.73 0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantap an Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a	ASN DPMPTS P Kabupat en Bantul		5.098.435.128 ,00	DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bu lan	32 Orang/bu lan	4.852.055.85 8,00	4.902.210.73 0,00	4.911.310.73 0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantap an Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a			5.014.335.128 ,00	DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2.0 2	000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	68.760.000,0 0	68.760.000,0 0	68.760.000,0 0	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantap an Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a			84.100.000,00	DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capaia n RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 0	0 0	153.183.000, 00	156.598.000, 00	107.604.000, 00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	-		980.000.000,0 0	DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU	
	2	1 8	0 1	2.0 6	001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	6.220.000,00	6.220.000,00	6.220.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantap an Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a		23.000.000,00	DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU	
	2	1 8	0 1	2.0 6	001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantap an Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a		23.000.000,00	DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	13.540.000,00	13.540.000,00	13.540.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			42.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta Potensi Investasi	-			1 peta potensi	1 peta potensi	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Pelaku usaha		108.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			56.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			51.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	-	336.918.328,00	425.888.634,00	425.888.634,00			-	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul		417.610.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																			
							Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Kegiatan Usaha Dokumen	2 Kegiatan Usaha Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																			
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1800 Pelaku Usaha	1800 Pelaku Usaha	213.048.080,00	296.600.016,00	296.600.016,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																			
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				850 Pelaku Usaha	850 Pelaku Usaha	24.275.000,00	24.275.000,00	24.275.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			287.210.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Perio de Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				2 Dokumen	2 Dokumen	144.486.456,00	146.382.436,00	146.382.436,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			117.128.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							200.000.000,00	200.000.000,00	162.223.700,00						200.000.000,00		
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH							200.000.000,00	200.000.000,00	162.223.700,00						200.000.000,00		
7	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Penerapan budaya Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan				1 inovasi	1 inovasi	200.000.000,00	200.000.000,00	162.223.700,00							200.000.000,00	
	4	01	04	5.02		Peningkatan Budaya Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	-			1 dokumen	1 dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	4	01	04	5.02	0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota																	

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capaia n RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				1 Inovasi Dokumen	1 Inovasi Dokumen	200.000.000, 00	200.000.000, 00	162.223.700, 00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuanga n Khusus dari Pemerint ah Daerah Provinsi	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantap an Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a			200.000.000,0 0	DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H											7.083.714.29 3,00	7.352.341.03 1,00	7.209.770.23 1,00							14.441.117.25 6,00		

tabel dan data disesuaikan dengan hasil ekspor dari aplikasi SIPD

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

Kepala Dinas, 

(Dra. Annihayah, M.Eng)